

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan yang penting dalam memahami pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih. Berbagai kajian yang relevan di bidang administrasi publik memberikan gambaran mengenai implementasi program koperasi di berbagai daerah, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian tersebut memberikan wawasan dan referensi yang bermanfaat dalam menganalisis pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mukomuko. Selain itu, kajian terdahulu juga menjadi dasar dalam merumuskan fokus, rumusan masalah, dan tujuan penelitian sehingga penelitian ini memiliki pijakan teoritis dan empiris yang kuat.

Fathoni, dkk. (2025) Penelitian yang berjudul "Pengaruh Partisipasi Anggota terhadap Keberhasilan Koperasi (Suatu Kasus di Koperasi Produsen Sinar Jagung Priangan, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung)" menjelaskan bahwa keberhasilan koperasi merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam pengelolaan koperasi. Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan tersebut adalah tingkat partisipasi aktif anggota dalam setiap kegiatan koperasi. Rendahnya partisipasi anggota menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi karena keberhasilan koperasi sangat bergantung pada keterlibatan anggota dalam mendukung kegiatan usaha dan pengambilan keputusan. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang melibatkan 73 anggota koperasi sebagai responden, yang dipilih menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan koperasi, sehingga semakin tinggi tingkat partisipasi anggota, semakin besar pula peluang koperasi untuk berkembang dan mencapai tujuannya.



Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2025) berjudul “pelatihan persiapan pendirian cikareo selatan kabupaten sumedang” merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan pemahaman warga desa mengenai koperasi serta persiapan kelembagaan dan legalitas pendirian koperasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-kolaboratif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pelatihan, mulai dari sosialisasi, penyuluhan, survei potensi desa, hingga simulasi pembentukan koperasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang koperasi, tumbuhnya semangat kolektif, serta terbentuknya struktur awal kelembagaan koperasi yang legal dan siap beroperasi. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan seperti rendahnya literasi koperasi, keterbatasan modal, keterampilan manajerial, ketergantungan pada pihak eksternal, serta minimnya digitalisasi. Penelitian ini relevan dengan skripsi berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mukomuko” karena menekankan pentingnya edukasi, partisipasi masyarakat, pendampingan profesional, dan adopsi teknologi digital sebagai faktor kunci keberhasilan pendirian koperasi desa. Temuan ini dapat dijadikan pijakan untuk menyoroti bahwa keberhasilan pelaksanaan program koperasi di Mukomuko tidak hanya bergantung pada aspek administratif, tetapi juga pada kesiapan masyarakat, dukungan pemerintah desa, serta strategi pendampingan yang berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fahreza Rafiki, dkk. (2024) yang berjudul “Efektivitas Program Pemberdayaan dan Pelatihan dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”. menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan cukup efektif pada aspek ketepatan sasaran peserta, perencanaan, dan pengawasan. Namun, masih terdapat kelemahan pada aspek sosialisasi, pemahaman masyarakat, keberhasilan program, serta tindak lanjut. Faktor penghambat utama adalah kurangnya informasi, rendahnya partisipasi, dan tidak adanya tindak lanjut program. Faktor pendorongnya adalah adanya pengawasan dan peningkatan keterampilan masyarakat. Temuan Fahreza menegaskan bahwa efektivitas program pemberdayaan tidak hanya bergantung pada perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga pada keberlanjutan serta tindak lanjut. Kondisi ini sejalan dengan tantangan Koperasi Merah Putih di Mukomuko, di mana rendahnya kepercayaan masyarakat dan minimnya tindak lanjut menjadi hambatan utama.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputri and Hardiyan (2025) Berjudul “Analisis Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung di Kabupaten Manokwari Selatan.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap pemerintah daerah, dinas teknis, kepala kampung, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda, dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan koperasi berlangsung melalui beberapa tahapan penting, yaitu sosialisasi, musyawarah desa, pemilihan pengurus, penyusunan administrasi, dan pendaftaran badan hukum. Meskipun partisipasi masyarakat cukup tinggi, literasi

perkoperasian dan pemahaman terhadap mekanisme koperasi masih rendah, sehingga keterlibatan masyarakat cenderung belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi kuat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi kampung, asalkan didukung oleh pendampingan intensif, penguatan kapasitas organisasi, dan kebijakan yang lebih adaptif terhadap konteks sosial dan budaya lokal. Penelitian ini relevan sebagai dasar penelitian skripsi karena, Menjelaskan tahapan implementasi program Kopdes Merah Putih. Mengidentifikasi faktor pendukung seperti modal sosial dan partisipasi masyarakat. Menemukan kendala implementasi yang juga mungkin terjadi di daerah lain termasuk Kabupaten Mukomuko. Menyediakan model analisis pembentukan koperasi yang dapat dijadikan rujukan metodologis.

Penelitian yang dilakukan oleh (Oktapia, Titi Darmi, dan Dkk 2025) berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Lomba Desa Wisata Provinsi Bengkulu (Studi Kasus di Kabupaten Kepahiang). menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai efektivitas program. Dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 12 informan dari Dinas Pariwisata, kepala desa, serta pengurus Pokdarwis, penelitian ini menemukan bahwa dari aspek context program relevan dengan kebutuhan pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal. Pada aspek input, kebijakan dan dukungan kelembagaan cukup baik, namun masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Dari sisi process, pelaksanaan program berjalan sesuai prosedur, tetapi pendampingan dan monitoring pasca-lomba masih minim. Sedangkan pada aspek product, program berhasil meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap potensi wisata dan mendorong partisipasi lokal, meskipun dampak ekonomi dan keberlanjutan belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program cukup efektif, namun perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas SDM, pendampingan berkelanjutan, serta promosi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Relevansi penelitian ini adalah bahwa pendekatan evaluasi CIPP dapat dijadikan rujukan metodologis dalam menganalisis pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mukomuko, khususnya dalam melihat konteks kebijakan, input kelembagaan, proses implementasi, dan hasil program.

(Hamdani 2025) Dalam penelitiannya berjudul “Koperasi Desa Merah Putih dengan Pendekatan Usaha Mudharabah: Studi Kasus di Desa Jinkang, Sumedang” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggambarkan penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi di Desa Jinkang berhasil menerapkan sistem bagi hasil yang adil dan transparan antara anggota sebagai pemilik modal dan pengurus sebagai pengelola usaha. Model mudharabah ini terbukti meningkatkan motivasi anggota, memperkuat kepercayaan terhadap koperasi, serta memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan, ketahanan ekonomi desa, dan inklusi keuangan masyarakat. Dukungan pemerintah daerah dan perbankan, khususnya Himbara, menjadi faktor penting dalam mempercepat pembentukan dan pengembangan koperasi. Namun, penelitian ini juga menyoroti tantangan berupa keterbatasan literasi keuangan syariah dan pengawasan operasional, yang kemudian diatasi

melalui pelatihan rutin dan pembentukan dewan pengawas syariah desa. Relevansi penelitian ini terhadap skripsi berjudul Analisis Pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mukomuko terletak pada penekanan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga pada model pengelolaan usaha yang sesuai dengan konteks lokal. Pendekatan mudharabah yang diterapkan di Desa Jinkang dapat menjadi inspirasi bagi koperasi di Mukomuko untuk mengadopsi sistem pengelolaan berbasis keadilan, transparansi, dan prinsip syariah, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat keberlanjutan program koperasi desa.

Penelitian oleh Sukarno (2025) berjudul “Sosialisasi dan Pendampingan Hukum Pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Mojogedang dan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar” Penelitian ini menggunakan pendekatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi langsung dan diskusi dua arah dengan warga untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum pendirian koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih rendah, di mana sebagian besar warga hanya memahami koperasi sebagai wadah simpan pinjam sederhana tanpa menguasai aspek teknis seperti akta pendirian, pengesahan badan hukum, dan penyusunan AD/ART. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi literasi hukum terbatas, hambatan administratif, kapasitas sumber daya manusia yang minim, kondisi sosial-ekonomi, serta kurangnya pendampingan. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan strategi sosialisasi berbasis komunitas,

penyederhanaan materi hukum, pendampingan langsung oleh tenaga ahli, pelatihan manajemen koperasi, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Relevansi penelitian ini terhadap skripsi berjudul Analisis Pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mukomuko terletak pada penekanan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh pemahaman hukum dan tata kelola kelembagaan yang sah. Temuan ini dapat dijadikan pijakan untuk menyoroti pentingnya pendampingan hukum dan edukasi masyarakat dalam pelaksanaan program koperasi desa di Mukomuko, sehingga koperasi yang terbentuk tidak hanya legal secara formal tetapi juga mampu beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Roza (2024) berjudul “Strategi Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih: Tinjauan Literatur atas Praktik Terbaik dan Tantangan Global”. Hasil penelitian ini menemukan lima strategi utama dalam pengembangan koperasi desa, yaitu penguatan kelembagaan melalui tata kelola yang transparan dan manajemen profesional, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan manajerial dan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi serta digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas akses pasar, peningkatan partisipasi serta pemberdayaan komunitas lokal sebagai fondasi keberlanjutan koperasi, serta dukungan kebijakan pemerintah dan sinergi dengan pihak eksternal seperti BUMN dan lembaga keuangan. Penelitian ini menekankan bahwa pengembangan koperasi desa memerlukan pendekatan holistik dan integratif yang memperhatikan kapasitas kelembagaan, kesiapan

teknologi, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini memberikan penekanan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada aspek legalitas dan pendanaan, tetapi juga pada strategi kelembagaan, penguatan SDM, digitalisasi, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Temuan ini dapat dijadikan pijakan untuk menyoroti pentingnya reformasi tata kelola, literasi digital, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program koperasi desa di Mukomuko.

Penelitian yang dilakukan oleh Salsabil,dkk. (2025) yang berjudul “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden” Fokus penelitian ini adalah menganalisis legalitas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dalam perspektif hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Inpres sebagai dasar hukum pendirian koperasi tidak memenuhi asas legalitas dan melampaui batas diskresi yang sah, sehingga berpotensi melemahkan otonomi desa serta menimbulkan tumpang tindih kelembagaan dengan BUMDes yang telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menekankan pentingnya prinsip *good governance* dan perlunya landasan hukum yang lebih kuat, minimal berupa Peraturan Presiden atau idealnya undang-undang khusus, agar pembentukan koperasi desa memiliki legitimasi yang jelas dan tidak menimbulkan konflik kewenangan. penelitian ini terhadap skripsi berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mukomuko” terletak pada penekanan bahwa keberhasilan pelaksanaan program koperasi tidak hanya bergantung pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga pada

kepastian hukum dan tata kelola kelembagaan. Temuan ini dapat dijadikan pijakan untuk menyoroti bahwa kelemahan regulasi dan dasar hukum dapat menjadi faktor penghambat implementasi koperasi desa di Mukomuko, sehingga analisis pelaksanaan program harus mempertimbangkan aspek legalitas selain faktor partisipasi masyarakat dan manajemen kelembagaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2025) berjudul “Edukasi Pencatatan Keuangan Sederhana dan Sosialisasi Koperasi Merah Putih di Desa Badak” Penelitian ini menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif dengan melibatkan langsung pelaku usaha mikro, perangkat desa, dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan pencatatan keuangan sederhana mampu meningkatkan keterampilan masyarakat dalam memisahkan keuangan pribadi dan usaha, menyusun laporan sederhana, serta mengambil keputusan bisnis yang lebih bijak. Selain itu, kegiatan sosialisasi koperasi berhasil menumbuhkan kesadaran dan minat masyarakat untuk mengaktifkan kembali Koperasi Merah Putih sebagai wadah ekonomi kolektif. Temuan ini menegaskan bahwa literasi keuangan dan sosialisasi kelembagaan koperasi merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan. penelitian ini terhadap skripsi berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mukomuko” terletak pada penekanan bahwa keberhasilan pelaksanaan program koperasi tidak hanya bergantung pada aspek kelembagaan dan kebijakan, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam mengelola keuangan usaha serta membangun kepercayaan terhadap koperasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pijakan bahwa strategi edukasi dan

sosialisasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat dan trauma terhadap koperasi di Mukomuko.

2.2 Kerangka Konsep dan Landasan Teori

Penelitian ini digunakan sebagai acuan konseptual dalam memahami dinamika pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mukomuko. Peneliti dapat menempatkan permasalahan yang muncul seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya kepercayaan terhadap koperasi dalam kerangka pemikiran yang sistematis. Selain itu, Teori program memberikan perspektif penting untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa. Teori program menekankan bahwa setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, tahapan pelaksanaan yang terstruktur, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam konteks koperasi desa merah putih, teori program membantu menjelaskan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh aspek legalitas kelembagaan, tetapi juga oleh faktor sosial seperti kepercayaan masyarakat, partisipasi anggota, dan relevansi manfaat yang dirasakan.

Dengan mengintegrasikan Teori tersebut, kajian ini berupaya memberikan pemahaman holistik mengenai Pendekatan ini tidak hanya menyoroti aspek administratif dan legalitas kelembagaan, tetapi juga mengaitkan faktor sosial, psikologis, dan historis yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi factor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan program koperasi desa merah putih di Kabupaten Mukomuko.

2.2.1 Konsep Teori Program Menurut Para Ahli

a. Konsep program Menurut Hans Hochholzer dalam E. Hetzer (2012)

(Hans Hochholzer dikutip E. Hetzer 2012) adalah Sebagaimana dikutip oleh E. Hetzer (2012), mendefinisikan program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi ini menekankan bahwa sebuah program bukan sekadar dokumen perencanaan atau kebijakan tertulis, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Akhirnya, Teori Hans Hochholzer ini berfokus pada keterpaduan dan sistematisasi program sebagai instrumen kebijakan yang harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hingga dalam konteks Kabupaten Mukomuko, teori ini relevan karena meskipun hampir seluruh desa telah memiliki Koperasi merah Putih dengan legalitas yang lengkap seperti NIB dan NPWP, tantangan utama tetap muncul pada aspek sosial, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penerapan teori Hochholzer memberikan kerangka konseptual bahwa program Koperasi Desa Merah Putih hanya dapat berkembang apabila dijalankan secara sistematis dan terpadu, serta mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat sebagai fondasi partisipasi.

Berdasarkan teori program (Hans Hochholzer dalam E. Hetzer 2012) terdapat lima indikator utama yang menjadi dasar dalam menganalisis pelaksanaan program koperasi merah putih ini yaitu:

1. Input

komponen awal yang sangat penting dalam menentukan kesiapan dan kapasitas suatu program untuk dilaksanakan secara efektif. Indikator input mencakup berbagai sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program, seperti sumber daya manusia, finansial, fisik, regulatif, dan sosial.

2. Proses

menggambarkan tahapan pelaksanaan kegiatan setelah input tersedia, yang menunjukkan bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan program. Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mukomuko, proses ini mencakup kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat koperasi, pengorganisasian struktur kepengurusan secara demokratis, serta penerapan sistem manajemen yang transparan.

3. Output

Merujuk pada hasil langsung yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan, yaitu apa yang dihasilkan setelah proses berjalan. Dan terbentuknya struktur kepengurusan koperasi yang sah dan berfungsi secara demokratis. Kedua, adanya peningkatan jumlah anggota koperasi yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan, baik melalui simpanan maupun rapat anggota.

Dengan menggunakan kelima indikator tersebut, penelitian ini dapat menganalisis sejauh mana Pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan secara efektif. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program sehingga dapat menjadi dasar bagi upaya perbaikan dan peningkatan efektivitas program.

b. Konsep Program menurut (Suharsimi Arikunto 2012)

Suharsimi Arikunto (2012) adalah seorang akademisi dan pakar pendidikan Indonesia yang dikenal luas sebagai penulis berbagai buku metodologi penelitian, evaluasi pendidikan, serta manajemen program. Beliau merupakan dosen di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan banyak dijadikan rujukan oleh mahasiswa maupun peneliti dalam bidang ilmu pendidikan dan penelitian sosial.

Menurut Suharsimi Arikunto (2012), program adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan secara seksama untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menekankan bahwa sebuah program tidak muncul secara spontan, melainkan hasil dari proses perencanaan yang matang dan sistematis. Dalam karya-karyanya, Suharsimi Arikunto menekankan pentingnya perencanaan yang sistematis dalam setiap kegiatan atau program. Menurutnya, program adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan secara seksama untuk mencapai tujuan tertentu.

Definisi ini menekankan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada adanya legalitas administratif, tetapi juga pada bagaimana kegiatan yang direncanakan benar-benar dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Mukomuko, meskipun koperasi merah putih telah memiliki legalitas seperti NIB dan NPWP, tantangan utama tetap muncul karena rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan mendasar, yaitu membangun kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Trauma historis akibat kegagalan KUD di masa lalu membuat masyarakat ragu untuk bergabung, sehingga tujuan program pemberdayaan ekonomi desa belum tercapai. Dengan merujuk pada pandangan Arikunto, dapat ditegaskan bahwa program koperasi desa merah putih harus dirancang lebih seksama, tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada strategi nyata yang mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi anggota.

c. Konsep Program Menurut (Farida Yusuf Tayibnapis (2013))

Farida Yusuf Tayibnapis (2013) adalah seorang akademisi Indonesia yang dikenal sebagai pakar dalam bidang evaluasi program, manajemen pendidikan, dan penelitian kebijakan publik. Beliau merupakan dosen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan banyak menulis buku serta artikel ilmiah yang menjadi rujukan mahasiswa dan peneliti, khususnya dalam kajian evaluasi program dan manajemen pendidikan.

Dalam karya-karyanya, Farida Yusuf Tayibnapis menekankan bahwa program adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau organisasi dengan harapan mendatangkan hasil atau pengaruh tertentu. Definisi ini menyoroti bahwa sebuah program harus berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar pada proses administratif.

Dengan Pokok Pemikiran Farida Yusuf Tayibnapis Program sebagai kegiatan terencana Program harus dirancang dengan tujuan yang jelas dan langkah-langkah yang sistematis. Dan Program berorientasi pada hasil

Keberhasilan program diukur dari manfaat atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat atau organisasi. Dengan Evaluasi program Beliau banyak menekankan pentingnya evaluasi sebagai bagian integral dari program. Evaluasi bukan hanya menilai pencapaian tujuan, tetapi juga mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Teori Farida Yusuf Tayibnapis (2013) memberikan kerangka konseptual bahwa keberhasilan koperasi desa merah putih harus diukur dari hasil dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar dari legalitas kelembagaan. Hal ini menegaskan bahwa strategi perbaikan program harus diarahkan pada upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi anggota agar tujuan pemberdayaan ekonomi desa benar-benar tercapai.

2.2.2 Konsep program Koperasi Merah Putih di Indonesia

Masalah Koperasi Merah Putih di Indonesia telah menjadi tantangan serius dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Permasalahan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia pada masa depan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merumuskan berbagai kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan meluncurkan berbagai kebijakan dan program pendukung untuk memperkuat kelembagaan koperasi desa. Dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, Koperasi Merah Putih di Indonesia diharapkan memiliki landasan hukum yang jelas untuk menjalankan aktivitasnya. Program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diluncurkan Presiden RI. Dengan landasan hukumnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi desa/kelurahan Merah Putih. Selain itu, PMK Nomor 81 Tahun 2025 menjadikan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai syarat pencairan Dana Desa.

Selain itu, dalam rencana Program jangka menengah nasional (RPJMN), pemerintah Indonesia menempatkan penguatan kelembagaan ekonomi desa sebagai salah satu prioritas pembangunan. Program koperasi merah putih menjadi bagian dari strategi tersebut, dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat desa terhadap sumber daya ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan lapangan kerja baru. Namun, sebagaimana terlihat di Kabupaten Mukomuko, meskipun koperasi merah putih telah terbentuk hampir di seluruh desa, tantangan tetap muncul pada aspek partisipasi masyarakat. Pemerintah juga mendorong penguatan koperasi merah putih melalui berbagai kebijakan pendukung, baik di

tingkat pusat maupun daerah. Dorongan ini diwujudkan dalam bentuk regulasi, pendampingan teknis, serta integrasi program koperasi dengan Dana Desa agar koperasi memiliki sumber daya yang memadai untuk berkembang.

Di tingkat daerah Kabupaten Mukomuko, pemerintah daerah menindak lanjuti kebijakan nasional tentang koperasi merah putih dengan melakukan penyesuaian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta memberikan dukungan kelembagaan bagi pembentukan koperasi di setiap desa. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen daerah untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang telah diluncurkan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2025, Kabupaten Mukomuko mulai membangun koperasi merah putih di 44 titik dari total 150 koperasi desa yang direncanakan, dengan harapan koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Peraturan ini menekankan pentingnya peran koperasi sebagai instrumen utama pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Melalui regulasi yang mewajibkan setiap koperasi memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemerintah berupaya memastikan bahwa koperasi memiliki landasan hukum yang jelas, akuntabilitas yang terukur, serta akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi.

Salah satu pelaksanaan unggulan yang diprogramkan di Kabupaten Mukomuko adalah pembangunan koperasi merah putih di setiap desa sebagai instrumen utama pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini menjadi prioritas daerah karena sejalan dengan kebijakan nasional yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui regulasi dan dukungan

Dana Desa. Namun, meskipun program unggulan ini telah berjalan, tantangan tetap muncul pada aspek partisipasi masyarakat. Rendahnya kepercayaan akibat trauma kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu membuat masyarakat enggan bergabung, sehingga tujuan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa belum sepenuhnya tercapai.

2.3 Kerangka Berpikir

Pelaksanaan program koperasi desa merah putih menjadi variabel utama yang diukur dalam penelitian ini. Pelaksanaan program ini mencakup berbagai intervensi yang dirancang dan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti penyediaan akses permodalan yang lebih mudah dan bebas riba, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan koperasi, serta digitalisasi sistem koperasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, keberhasilan pelaksanaan program ini sangat bergantung pada dua faktor utama: partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan.

Pelaksanaan program ini mencakup berbagai intervensi yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto bersama pemerintah pusat sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa. Selain itu, pemerintah juga merancang intervensi berupa pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, serta penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau melalui jaringan koperasi.

Faktor partisipasi masyarakat terdiri atas elemen-elemen yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Dari sisi sumber daya,

partisipasi masyarakat diperkuat oleh kombinasi SDM yang kompeten, modal yang jelas, infrastruktur yang memadai, solidaritas sosial, serta potensi ekonomi lokal yang dapat diolah. Semua elemen ini saling terkait dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi desa yang berkelanjutan. Selain itu, disposisi pelaksanaan program juga menjadi faktor penting yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih. Disposisi di sini merujuk pada sikap, nilai, dan kecenderungan perilaku masyarakat terhadap koperasi.

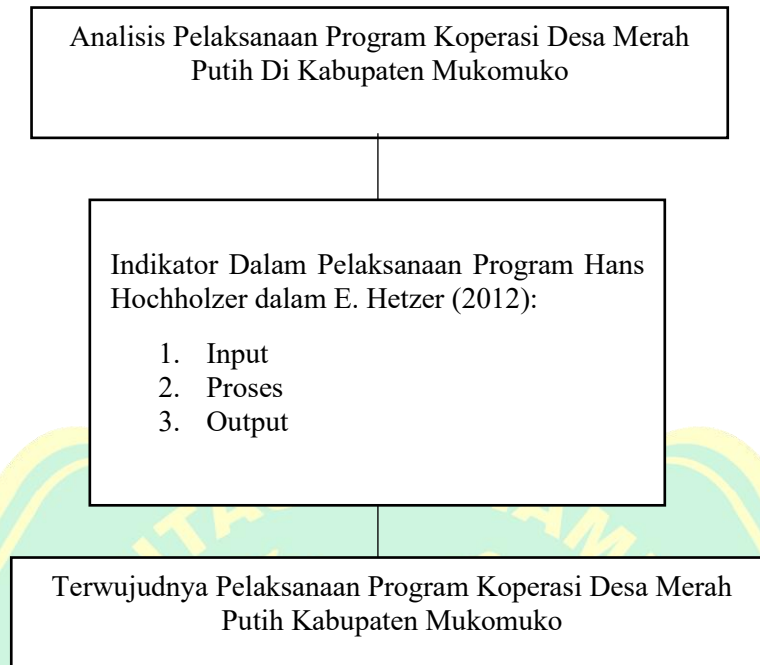
Sebaliknya faktor dukungan kelembagaan mencakup tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas program. Dalam aspek sumber daya, pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas faktor-faktor pendukung yang menjadi fondasi keberhasilan koperasi. Di kabupaten mukomuko pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih sangat dipengaruhi oleh aspek sumber daya yang tersedia di wilayah tersebut.

Dinamika antara faktor partisipasi Masyarakat dan faktor dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan program memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan program dalam menentukan Tingkat keberhasilan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih, ada beberapa aspek yang bisa dijadikan ukuran atau indikator utama pelaksanaan program, sebagaimana dirumuskan dalam teori program Indikator-indikator tersebut meliputi: mendukung pelaksanaan, keterlibatan masyarakat, berupa hasil, meningkatnya partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat. Apabila seluruh indikator ini mampu berjalan secara konsisten dan saling mendukung, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan

program Koperasi Desa Merah Putih akan semakin tinggi. Maka tingkat keberhasilan program akan tercapai secara optimal.

Dukungan yang kuat dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih menjadi faktor penentu keberhasilan karena ia berfungsi sebagai fondasi yang menjaga keberlanjutan dan efektivitas program. Dukungan ini mencakup beberapa dimensi penting. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada dinamika antara partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan.



Tabel 2.3 kerangka berpikir

Pada Kerangka Berpikir diatas, dapat dilihat bahwa konsep dari penelitian ini yaitu penelitian akan memulai pada proses mencari data dari kantor koperasi merah putih di kabupaten mukomuko sebagai data utama yaitu dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan yang berwewenang di koperasi desa merah putih.

Penelitian di kantor koperasi desa merah putih kabupaten mukomuko ini berlandaskan dari teori Hans Hochholzer dalam E. Hetzer (2012) yang menjelaskan bahwasannya teori ini sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam meningkatkan koperasi desa merah putih di pemerintahan untuk masyarakat, dengan teori ini penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana koperasi memenuhi tujuan tersebut dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan

penelitian nantinya dapat di melihat apa saja faktor penghambat dan faktor apa saja pendukung dari koperasi desa merah putih. Sehingga penulis dapat menyimpulkan pada hasil akhir apakah masyarakat sudah dapat membantu meningkatkan program Koperasi Desa Merah Putih Di Kabupaten Mukomuko. Diagram kerangka berpikir yang disajikan memberikan ilustrasi visual hubungan.

